

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kajian mengenai perkotaan, hal-hal yang akan tampak tidak hanya mengenai perkembangan dan pertumbuhan kota, tetapi juga masalah perkotaan yang hampir sama di tiap tempat di berbagai negara. Masalah perkotaan tersebut antara lain adanya kemiskinan penduduk kota, kawasan kumuh, menjamurnya sektor informal dan pencemaran yang diakibatkan oleh industri.

Salah satu masalah perkotaan yang sedang aktual bahkan menjadi agenda yang dibicarakan dalam *Millennium Development Goals* adalah kawasan kumuh (Bappeda Kota Pontianak, 2006). Kawasan kumuh merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi khususnya di negara berkembang atau di negara-negara dunia ketiga.

Di tahun 2001 diperkirakan hampir satu milyar penduduk kota di seluruh dunia tinggal di kawasan kumuh. Sekitar 6% penduduk kota yang ada di negara maju dan 43% - 78% penduduk kota di negara berkembang merupakan penghuni kawasan kumuh (Lemma, 2005: 1). Berkaitan dengan hal tersebut, survei UN-HABITAT (2003) menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

Kawasan negara berkembang seperti Afrika, Asia dan Amerika Selatan rata-rata memiliki persentase rumah kumuh sekitar 10,1% - 99,4%, sebaliknya Amerika Utara, Eropa dan Australia hanya memiliki 0% - 10% rumah kumuh (Turkstra & Raithelhuber, tanpa tahun).

Munculnya kawasan kumuh dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain: adanya urbanisasi; bencana alam seperti gempa bumi maupun bencana sosial seperti perang dan pertikaian antar suku; serta adanya pertumbuhan penduduk yang melebihi kapasitas lahan dan jumlah fasilitas. Selain itu kemiskinan penduduk kota yang disebabkan oleh adanya kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, menjadi salah satu pemicu terbentuknya kawasan kumuh.

Khususnya bagi negara-negara berkembang, kemiskinan yang melahirkan kekumuhan di perkotaan tidak terlepas dari andil kebijakan global yang belum saatnya diterapkan dan pada akhirnya merugikan negara-negara tersebut. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah perdagangan bebas dan industrialisasi yang mematikan petani lokal, sehingga terjadilah urbanisasi (Davis, 2006).

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang, memiliki sejumlah kawasan kumuh yang tersebar hampir merata di desa dan kota pada tiap provinsi. Sekitar 14% dari total perumahan di Indonesia merupakan kawasan perumahan kumuh perkotaan, yang biasanya berada di bantaran kali dan tepi pantai. Diperkirakan sekitar 18% dari total penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh perkotaan yang luasnya mencapai 42.500 hektar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat Noer Soetrisno, sebagai berikut:

Jika satu hektar ditempati oleh sekitar 500 jiwa penduduk Indonesia seperti ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), maka total 42.500 hektar dikali 500 jiwa jumlahnya 21,25 juta jiwa atau hampir

sekitar 18 persen dari total penduduk Indonesia yang sekitar 120 juta jiwa tinggal di kawasan kawasan kumuh (Suara Karya, 3 Oktober 2006).

Jumlah tersebut walaupun tidak sebanding dengan apa yang terjadi di negara Asia lainnya seperti India ataupun negara-negara di Afrika, tetap saja dapat berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar pembangunan yang terjadi di Indonesia berpusat di kota-kota besar.

Keberadaan kawasan kumuh sebagai wajah kota yang buruk sangat bertolak belakang dengan konsep kawasan yang ideal, sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Maryani (2002: 52 - 53) bahwa kawasan kumuh (*slum area*) adalah suatu kawasan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat standar, dicirikan dengan rumah yang padat penghuninya dan kondisi rumahnya tidak sesuai standar kesehatan dan keamanan.

Syarat-syarat standar tersebut biasanya menyangkut hal-hal berikut yaitu tersedianya sarana dan prasarana seperti sanitasi, drainase dan jalan; kondisi bangunan yang baik; serta lokasi yang legal dan aman dari ancaman bencana (Astuti, 2003; Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002; Lemma, 2005). Karena itu, adanya kawasan kumuh sebagai kawasan yang kurang sehat dan kurang aman biasanya berdampak khususnya bagi penduduk kawasan kumuh itu sendiri, seperti terhadap kesehatan ataupun keadaan sosial yang cenderung menjadi lebih buruk.

Keberadaan kawasan kumuh cenderung tersebar berdasarkan pola-pola tertentu dan biasanya berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Di Kota Pontianak,

kawasan kumuh tersebar hampir di sepanjang aliran Sungai Kapuas dan terkonsentrasi di percabangan sungai yaitu Sungai Kapuas – Kapuas Kecil – Landak (Peta Persebaran Kawasan Kumuh Bappeda Kota Pontianak, 2004). Kawasan kumuh di Kota Pontianak menempati wilayah seluas 247,77 Ha atau sekitar 2,3% dari seluruh wilayah Kota Pontianak (Bappeda Kota Pontianak, 2006).

Terkait dengan hal tersebut, secara umum terdapat tiga karakteristik kawasan kumuh di Kota Pontianak yang meliputi kawasan pedesaan, kawasan transisi dan kawasan perkotaan (Laporan Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pontianak, 2006). Wilayah yang termasuk ke dalam kawasan perkotaan adalah sebagian dari Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Selatan dan Pontianak Kota. Wilayah yang termasuk ke dalam kawasan transisi adalah sebagian dari Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Barat, sedangkan wilayah yang termasuk ke dalam kawasan pedesaan adalah Kecamatan Pontianak Utara dan sebagian dari Kecamatan Pontianak Timur.

Di Kota Pontianak, kawasan kumuh terluas berada di Kecamatan Pontianak Timur yaitu dengan 62,81 Ha, kemudian Kecamatan Pontianak Barat dengan 53,36 Ha, Kecamatan Pontianak Kota dengan 49,25 Ha, Kecamatan Pontianak Utara dengan 42,40 Ha dan Kecamatan Pontianak Selatan dengan 39,95 Ha (Bappeda Kota Pontianak, 2006). Lokasi persebaran kawasan kumuh di masing-masing kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: terdapat di 9 Rukun Warga (RW) di Pontianak Utara; 18 RW di Pontianak

Timur; 11 RW di Pontianak Selatan; 17 RW di Pontianak Barat; 8 RW di Pontianak Kota (Laporan Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pontianak, 2006).

Walaupun hanya menempati sekitar 2,3% dari luas seluruh wilayah Kota Pontianak, keberadaan kawasan kumuh di Kota Pontianak tetap menjadi suatu masalah, terutama apabila dikaitkan dengan visi Kota Pontianak sebagai “Kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional” (Bappeda Kota Pontianak, 2006). Salah satu konsekuensi dari visi tersebut adalah menjadikan Kota Pontianak sebagai *Water Front City* (kawasan yang berorientasi ke badan perairan membentuk karakter koridor sungai). Prasyarat bagi pembangunan *Water Front City* tersebut antara lain adanya upaya untuk memperbaiki nilai estetika lingkungan, dan tetap terpeliharanya kualitas perairan Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Hal ini tentunya cukup kontras jika dibandingkan dengan keberadaan kawasan kumuh yang sebagian besar berada di tepian atau pesisir Sungai Kapuas.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu kiranya diadakan peninjauan tentang bagaimana sebenarnya karakteristik kawasan kumuh yang ada di Kota Pontianak saat ini sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kekumuhan yang terjadi dan aspek apa yang paling berperan terhadap kekumuhan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Keberadaan kawasan kumuh di Kota Pontianak dapat menjadi sangat mengkhawatirkan khususnya bagi penduduk yang hidup di wilayah tersebut,

apalagi jika derajat kekumuhannya terkategori sangat buruk. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari keberadaan kawasan kumuh tersebut adalah bagi lingkungan dan kesehatan serta kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu kiranya mengetahui seberapa jauh fenomena kekumuhan yang ada serta kawasan mana yang memiliki nilai kekumuhan paling tinggi.

Permasalahan utama yang muncul adalah “Bagaimana karakteristik kawasan kumuh di Kota Pontianak”, dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana kondisi fisik dan sosial-ekonomi kawasan kumuh pedesaan, transisi dan kota?
2. Seberapa besar tingkat kekumuhan yang terjadi pada kawasan kumuh pedesaan, transisi dan kota?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kekumuhan antara kawasan kumuh pedesaan, transisi dan kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi fisik dan sosial-ekonomi kawasan kumuh di Kota Pontianak yang terdiri atas kawasan kumuh pedesaan, transisi dan kota.
2. Mengetahui besaran tingkat kekumuhan pada kawasan kumuh pedesaan, transisi dan kota.
3. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dalam tingkat kekumuhan antara kawasan kumuh pedesaan, transisi dan kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan gambaran objektif mengenai keadaan kawasan kumuh di Kota Pontianak, sehingga dapat dijadikan bahan atau sumber belajar untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya bagi masyarakat kota Pontianak.
2. Mendapatkan informasi mengenai kawasan kumuh yang memiliki tingkat kekumuhan lebih tinggi, sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk diprioritaskan dalam perbaikan lingkungan kumuh.
3. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori geografi, terutama mengenai konsep perbedaan wilayah (*areal differencess*) dan keunikan wilayah (*areal uniqueness*).

E. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Kawasan kumuh adalah suatu kawasan yang tidak memenuhi syarat standar baik dilihat dari kondisi fisik (infrastruktur fisik), maupun kondisi penduduknya (sosial-ekonomi). Hal tersebut dicirikan dengan rumah yang padat penghuninya dengan kondisi rumah tidak sesuai standar kesehatan dan keamanan serta adanya ketidakteraturan sosial.
2. Aspek fisik kawasan kumuh terkait dengan kondisi bangunan serta sarana dan prasarana yang ada di kawasan kumuh. Kondisi bangunan dikatakan kumuh jika lebih dari 10% dari jumlah rumah yang ada tergolong tidak

atau semi permanen. Kondisi sarana dan prasarana dikatakan kumuh jika tidak memiliki sarana dan prasarana atau lebih dari 10% dari sarana dan prasarana yang ada berkondisi tidak baik.

3. Aspek sosial-ekonomi kawasan kumuh terkait dengan kondisi kependudukan di kawasan kumuh, kondisi kesehatan dan keamanan, tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan persepsi. Kondisi kependudukan dikatakan kumuh jika kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha dan tingkat pertumbuhan penduduknya lebih dari 1%. Dikatakan kumuh pula jika tingkat kemiskinan dan pendapatan penduduk yang rendah berada di atas 6%, tingkat pendidikan rendah di atas 1% dan jumlah kejahatan lebih dari satu kali dalam setahun
4. Lokasi kawasan kumuh adalah tempat keberadaan kawasan kumuh yang ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan di Kota Pontianak. Kawasan kumuh di Kota Pontianak mencakup tiga kawasan yaitu kawasan kumuh yang berlokasi di kawasan pedesaan, kawasan transisi dan kawasan kota.
5. Tingkat kekumuhan adalah ukuran kekumuhan suatu kawasan kumuh dibandingkan dengan kawasan kumuh lainnya. Tingkat kekumuhan diperoleh dari penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu lokasi, kependudukan, kondisi bangunan, kondisi sarana dan prasarana serta kondisi sosial ekonomi. Kekumuhan terdiri atas lima tingkatan, yaitu Sangat Kumuh (SK) sebagai tingkat kekumuhan yang paling tinggi, Kumuh Berat (KB), Kumuh Sedang (KS), Kumuh Ringan (KR) dan Tidak Kumuh (TK).

Berdasarkan definisi operasional tersebut, karakteristik kawasan kumuh di Kota Pontianak merupakan gambaran dari kondisi fisik dan sosial-ekonomi penduduknya serta seberapa besar tingkat kekumuhannya. Terkait dengan geografi, studi mengenai kawasan kumuh merupakan objek kajian geografi baik secara material maupun formal. Karena kajian mengenai kawasan kumuh merupakan bagian dari salah satu studi geografi manusia yaitu geografi perkotaan. Selain itu kawasan kumuh itu sendiri menunjukkan suatu kekhususan region atau wilayah yang menjadi bahasan geografi.

